

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada era globalisasi saat ini tuntutan masyarakat terhadap tata pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002). Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014).

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Hapsari, 2008). Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo, 2009).

Bagi Pemerintah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini, berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester 1 Tahun 2016, BPK mengungkapkan Atas 221 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan (IHPS 1 BPK RI Tahun 2016).

Fenomena mengenai permasalahan pelaporan keuangan, seperti disajikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015, bahwa ada 35 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terlambat disampaikan untuk diperiksa oleh BPK. Selanjutnya, Harry Azhar Aziz (Ketua BPK) juga mengungkapkan bahwa permasalahan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya disebabkan karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu, karena para pejabat/pelaksana belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, serta keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Selain itu berikut adalah fenomena mengenai laporan keuangan:

**Tabel 1.1**  
**Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

<b>Kriteria</b>	<b>Sumber</b>	<b>Nama pengarang</b>	<b>Fenomena</b>
<b>Fenomena :</b> Kualitas Laporan Keuangan Daerah	<b>Diposting :</b> Senin, 12 Juni 2017 23:00WIB <a href="http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/12/laporan-keuangan-kota-bandung-wdp-lagi-ridwan-kamil-tetap-optimistis-403070">http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/12/laporan-keuangan-kota-bandung-wdp-lagi-ridwan-kamil-tetap-optimistis-403070</a>	Muhammad  Ibnu S	Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat.  Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 triliun.
	Rabu, 30 Mei 2018 16:39 WIB <a href="https://news.detik.com">https://news.detik.com</a>	Mukhlis  Dinillah	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

	<p><a href="#"><u>/jawabarat/4045429/kota-bandung-bandung-barat-dan-subang-gagal-raih-opini-wtp</u></a></p>		<p>(LKPD) TA 2017 kepada 27 kabupaten kota. Hasilnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang gagal raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penyerahan LPH LKPD TA 2017 ini dilakukan secara bertahap kepada 27 kabupaten kota. TA 2017, hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).</p>
	<p>Jumat, 04 Mei 2018 17:39 WIB <a href="https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-rendah"><u>https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-rendah</u></a></p>	<p>Wilda Fizriyani</p>	<p>Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah. Padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, terutama korupsi di sejumlah pemerintahan daerah. IAI sebenarnya sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar pemerintahan Indonesia di Kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua. Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Hal</p>

			<p>ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Untuk itu, agar transparansi kepada publik semakin kuat dengan pelaporan keuangan, peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan.</p>
--	--	--	--

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku (Nordawan , 2010). SAP merupakan pelaksanaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Udiyanti, dkk, 2014). Apabila dikaitkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, apabila entitas pelaporan belum dapat sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan menyebabkan pada menurunnya kredibilitas laporan keuangan pemerintah dan kemampuan untuk dipahami oleh para pengguna.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia yaitu kualitas aparatur daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam bekerja. Pegawai diharapkan selalu mengasah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan agar lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman serta dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam organisasi tersebut.

Aparatur pemerintah daerah sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur pemerintah mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu tidak dapat

dipungkiri bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan. Hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu penerapan *Good Governance* (pemerintahan yang baik). tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari *good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu memiliki tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat tersebut tidak sebanding atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik. Peranan pemerintah yang saat ini telah beralih dari *government* ke *governance*, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Beberapa kata kunci pelayanan publik prima antara lain, pedoman penyelenggaraan, standar pelayanan, transparansi, akuntabilitas dan standar pelayanan minimal. Pelayanan publik prima yang berkualitas merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :



1. Pengaruh *Good Governance* yang diteliti oleh Desmaria puji (2014), Rita Andiani SE,MM (2016), dan Shannaz Erdina Suryadi (2013).
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diteliti oleh Rita Andiani SE,MM (2016), Ade Saputra (2015), Dicky Rahman (2015), Desmaria Puji (2017), T. Asri Yunita (2015), Ni Luh Nyoman Ari Udianti (2014), Yohanes Suhardjo (2013), Rukmi Juita (2013), dan Eka Danofi R (2012).
3. Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah yang diteliti oleh Rita Andiani SE,MM (2016), Yohanes Suhardjo (2013), dan Desmaria Puji (2017).
4. Sistem Pengendalian Internal yang diteliti oleh Desmaria Puji (2017), Ade Saputra ( 2015), T. Asri Yunita (2015), dan Ni Luh Nyoman Ari Udianti (2014).
5. Kompetensi SDM yang diteliti oleh Ade Saputra ( 2015), dan Shannaz Erdina Suryadi (2013).
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diteliti oleh Dicky Rahman (2015).
7. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diteliti oleh Dicky Rahman (2015).
8. Kompetensi Staf Akuntansi yang diteliti oleh T. Asri Yunita (2015).

Berdasarkan Uraian diatas supaya memudahkan dalam menganalisis maka penulis menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan  
Berdasarkan Penelitian-penelitian Sebelumnya**

No	Tahun	Penelitian	Good Governance	Standar Akuntansi Pemerintahan	Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan	Sistem Informasi Akuntansi	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kompetensi Staf Akuntansi
1	2017	Desmaria Puji	√	√	√	√	-	√	-	-	-
2	2016	Mia Oktarina	√	√	√	-	-	-	-	-	-
3	2015	Ade Saputra	-	√	-	√	-	√	-	-	-
4	2015	Dicky Rahman	-	√	-	-	-	-	√	√	-
5	2015	T. Asri yunita	-	√	-	√	-	-	-	-	√
6	2014	Ni Luh nyoman dan Ari Udianty	-	√	-	√	-	-	-	-	√
7	2013	Yohanes Suhardjo	-	√	√	-	-	-	-	-	-
8	2013	Rukmi Juita	-	√	-	-	√	-	-	-	-
9	2013	Shannaz Erdina Suryadi	√	-	-	-	-	√	-	-	-
10	2012	Eka Danofi R	-	√	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

Tanda  $\checkmark$  : Berpengaruh

Tanda  $\times$  : Tidak Berpengaruh

Tanda - : Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mia Oktarina (2016) dengan judul “pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan ( Survey pada dinas pengelolaan keuangan aset daerah Kota Semarang).” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

1. Tempat penelitian penulis dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung (SKPD) sedangkan penelitian Mia Oktarina (2016) dilakukan di dinas pengelolaan keuangan aset daerah kota semarang. Alasannya karena penulis meneliti dengan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih bisa meneliti kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan peneliti sebelumnya ruang linkup kegiatannya lebih sedikit karena dilakukan di tempat pengelolaan keuangan aset daerah dan belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan konsisten.
2. Sampel penelitian penulis dilakukan pada 59 dinas dengan menggunakan *simple random sampling* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sedangkan penelitian Mia Oktarina (2016) dilakukan pada 227 pegawai dengan

pengambilan sampel menggunakan *proporsional random sampling* yaitu pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota populasi.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel ini adalah karena penelitian mengenai pengaruh pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good goverance* telah banyak diteliti, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai penerapan standar akuntansi, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada hasil yang dilakukan oleh Desmaria Puji (2017), Mia Oktarina (2016), Ade Saputra (2015), Dicky Rahman (2015), T. Asri Yunita dan Ari Udianty (2014), Yohanes Suhardjo (2013), Rukmi Juita (2013), dan Eka Danofi R (2012) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Desmaria Puji (2017), Mia Oktarina (2016), dan Yohanes Suhardjo (2013) menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Desmaria Puji (2017), Mia Oktarina (2016), dan Shannaz Erina Suryadi (2013) menunjukkan bahwa *goog governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.
2. Penyebab rendahnya kualitas pelaporan keuangan karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan.
3. Dampak yang akan ditimbulkan adalah munculnya peluang tindak pidana korupsi.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Kualitas Aparatur pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Penerapan *Good Governance* pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Bandung.

- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kompetensi Aparatur pada Pemerintah Kota Bandung.
- 3 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan *Good Governance* pada Pemerintah Kota Bandung.
- 4 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
- 5 Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
- 6 Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
- 7 Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
- 8 Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu, untuk mendukung ilmu sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, penerapan *good governance*, dan kualitas laporan keuangan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini:

#### **1. Bagi Penulis**

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas pasundan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur



pemerintah daerah, penerapan *good governance*, dan kualitas laporan keuangan.

- c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis dan analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, penerapan *good governance*, dan kualitas laporan keuangan.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, penerapan *good governance*, dan kualitas laporan keuangan.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan selesai.

